



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan. Akhmad Yani Km 4,5 Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah
Telp. ☎/Fax (0536) 4043599

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 000.7.2/06/Bappedalitbang-Um/2024

TENTANG

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra), maka harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2024 dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam menetapkan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, Juli 2024

4 KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KATINGAN

JONIAN TO, SP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP 19660601 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Dalam Rencana Kerja tahun 2025 menyajikan Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Sebelumnya serta informasi tentang Rencana Capaian Kinerja dan Rancangan Dana Indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2025 ini kami susun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 agar terwujudnya pelaksanaan tugas yang tertib, lancar, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kasongan, Juli 2024

4
f
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KATINGAN

JONIAN TO, SP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP 19660601 199803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kabupaten Katingan selalu berkomitmen memacu pembangunan di segala bidang termasuk sarana dan prasarana dan berguna untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagai Lembaga Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah dengan mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Katingan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan dalam hal ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa setiap instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD. Renja SKPD tersebut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
 - l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 - m. Peraturan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2)
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 24);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65)
- s. Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- t. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;
- u. Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai perumusan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagai implementasi pelaksanaan dan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2025 adalah sebagai :

- 1) Pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- 2) Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
- 3) Pedoman Penyusunan rencana anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Bappedalitbang merupakan penjabaran perencanaan tahunan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Bappedalitbang menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024, untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Katingan. Evaluasi berfungsi dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan di antaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan ke depan akan lebih baik. Pentingnya evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan, evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, poin selanjutnya evaluasi digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Dengan demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappedalitbang. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Untuk itu dalam tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti penetapan besaran indikator kinerja setiap jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan ditunjang dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 11.105.108.830,- yang dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 10.759.025.059,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 346.083.771,-. Terhadap Belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 10.759.025.059,- tersebut dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Rp. 9.904.188.349,- atau 92,05 %, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 346.083.771,- dapat direalisasikan penyerapannya Rp. 333.828.000,- atau

96,46 %, sehingga total penyerapan anggaran keuangan Bappedalitbang tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.238.016.349,- atau sebesar 92,19 % yang berarti termasuk dalam kategori capaian **“Cukup Berhasil”**.

Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sasaran, Realisasi Anggaran dan Sisa Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 1
Program, Kegiatan, Sasaran, dan Realisasi Anggaran Bappedalitbang
Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)
				KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA DAERAH	11.105.108.830	197	10.238.016.349	92,19	99,69
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.233.728.809	69	6.760.049.036	93,31	99,63
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.877.373	5	114.251.000	98,60	100,00
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.719.333	2	59.168.000	99,08	100,00
	- Belanja Operasi	59.719.333	2	59.168.000	99,08	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.836.222	1	11.780.000	99,53	100,00
	- Belanja Operasi	11.836.222	1	11.780.000	99,53	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	44.321.818	2	43.303.000	97,70	100,00
	- Belanja Operasi	44.321.818	2	43.303.000	97,70	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.718.858.899	12	3.696.721.684	96,72	100,00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.672.552.872	9	3.652.363.584	96,73	100,00
	- Belanja Operasi	3.672.552.872	9	3.652.363.584	96,73	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	46.306.027	3	44.358.100	95,79	100,00
	- Belanja Operasi	46.306.027	3	44.358.100	95,79	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.309.756.322	12	1.214.395.419	92,72	97,39
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	30.964.560	2	30.900.000	99,79	100,00
- Belanja Operasi	30.964.560	2	30.900.000	99,79	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.908.693	4	184.746.526	85,17	90,00
- Belanja Operasi	216.908.693	4	184.746.526	85,17	90,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.028.000	3	121.533.670	90,68	90,69
- Belanja Operasi	134.028.000	3	121.533.670	90,68	90,68
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.146.069	1	58.967.850	67,67	100,00
- Belanja Operasi	87.146.069	1	58.967.850	67,67	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	28.919.000	1	13.145.000	45,45	100,00
- Belanja Operasi	28.919.000	1	13.145.000	45,45	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.790.000	1	805.102.373	99,18	100,00
- Belanja Operasi	811.790.000	1	805.102.373	99,18	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.723.363	7	128.987.900	90,38	100,00
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.723.363	7	128.987.900	90,38	100,00
- Belanja Operasi	16.863.592	3	15.159.900	89,90	100,00
- Belanja Modal	125.859.771	4	113.828.000	90,44	100,00
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	917.047.000	11	690.403.560	75,29	100,00
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.623.000	2	164.603.560	81,64	100,00
- Belanja Operasi	201.623.000	2	164.603.560	81,64	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.340.000	4	77.358.000	87,57	100,00
- Belanja Operasi	88.340.000	4	77.358.000	87,57	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	627.084.000	5	448.442.000	71,51	100,00
- Belanja Operasi	627.084.000	5	448.442.000	71,51	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	764.465.852	21	742.079.472	97,07	100,00
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.990.000	2	40.171.576	98,00	100,00
- Belanja Operasi	40.990.000	2	40.171.576	98,00	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.170.100	6	303.063.896	93,78	100,00
- Belanja Operasi	323.170.100	6	303.063.896	93,78	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.305.752	13	398.844.000	99,63	100,00
- Belanja Operasi	180.081.752	11	178.844.000	99,31	100,00
- Belanja Modal	220.224.000	2	220.000.000	99,90	100,00
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.379.453.981	68	1.182.615.016	85,73	100,00
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	998.305.632	41	873.179.566	87,47	100,00
Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	26.677.000	3	12.260.000	45,96	100,00
- Belanja Operasi	26.677.000	3	12.260.000	45,96	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	17.875.343	5	17.064.750	95,47	100,00
- Belanja Operasi	17.875.343	5	17.064.750	95,47	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	53.540.115	6	53.168.750	99,31	100,00
- Belanja Operasi	53.540.115	6	53.168.750	99,31	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50.981.577	7	48.736.500	95,60	100,00
- Belanja Operasi	50.981.577	7	48.736.500	95,60	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	268.716.601	7	243.756.900	90,71	100,00
- Belanja Operasi	268.716.601	7	243.756.900	90,71	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	580.514.996	13	498.192.666	85,82	100,00
- Belanja Operasi	580.514.996	13	498.192.666	85,82	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-

	Kegiatan : Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90.861.445	9	83.700.900	92,12	100,00
	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90.861.445	9	83.700.900	92,12	100,00
	- Belanja Operasi	90.861.445	9	83.700.900	92,12	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	290.286.904	18	225.734.550	77,76	100,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten /Kota	201.104.664	11	156.943.550	78,04	100,00
	- Belanja Operasi	201.104.664	11	156.943.550	78,04	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89.182.240	7	68.791.000	77,14	100,00
	- Belanja Operasi	89.182.240	7	68.791.000	77,14	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1.579.475.812	25	1.533.107.832	97,06	100,00
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	425.413.414	12	401.068.200	94,28	100,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.980.000	1	7.705.000	51,44	100,00
	- Belanja Operasi	14.980.000	1	7.705.000	51,44	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	163.701.664	9	149.300.200	91,20	100,00
	- Belanja Operasi	163.701.664	9	149.300.200	91,20	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	246.731.750	2	244.063.000	98,92	100,00
	- Belanja Operasi	246.731.750	2	244.063.000	98,92	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	569.062.398	10	553.054.632	97,19	100,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	369.062.398	9	355.154.632	96,23	100,00
	- Belanja Operasi	369.062.398	9	355.154.632	96,23	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	200.000.000	1	197.900.000	98,95	100,00
	- Belanja Operasi	200.000.000	1	197.900.000	98,95	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	585.000.000	3	578.985.000	98,97	100,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	2	98.985.000	98,99	100,00
	- Belanja Operasi	100.000.000	2	98.985.000	98,99	100,00
	- Belanja Modal	-	-	-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	- Belanja Transfer	-	-	-	-	-

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	485.000.000	1	480.000.000	98,97	100,00
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)					
- Belanja Operasi	485.000.000	1	480.000.000	98,97	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	912.450.228	35	772.244.466	84,63	100,00
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	383.937.885	6	372.265.666	96,96	100,00
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	383.937.885	6	372.265.666	96,96	100,00
- Belanja Operasi	383.937.885	6	372.265.666	96,96	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	415.132.343	15	287.950.100	69,36	100,00
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	415.132.343	15	287.950.100	69,36	100,00
- Belanja Operasi	415.132.343	15	287.950.100	69,36	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	113.380.000	14	112.028.700	98,81	100,00
Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	13.380.000	1	12.745.000	95,25	100,00
- Belanja Operasi	13.380.000	1	12.745.000	95,25	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100.000.000	13	99.283.700	99,28	100,00
- Belanja Operasi	100.000.000	13	99.283.700	99,28	100,00
- Belanja Modal	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
- Belanja Transfer	-	-	-	-	-
SUBTOTAL BELANJA DAERAH	11.105.108.830	197	10.238.016.349	92,19	97,89
- SUB TOTAL BELANJA OPERASI	10.759.025.059	191	9.904.188.349	92,05	97,82
- SUB TOTAL BELANJA MODAL	346.083.771	6	333.828.000	96,46	100,00
- SUB TOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	0,00
- SUB TOTAL BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	0,00
TOTAL BELANJA	11.105.108.830	197	10.238.016.349	92,19	97,89

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan dana yang dibutuhkan adalah sebagian besar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan (APBD Kabupaten).

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Katingan, maka hasil evaluasi terhadap capaian kinerja urusan wajib bidang perencanaan pembangunan pada tahun 2023 yaitu tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Dokumen RKPD Tahun 2024.

Tabel 2

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi Bappedalitbang			C	CC	CC	B	BB	97,52%	103,32%	95,70%	96,63%	96,56%		
2	Nilai SAKIP Bappedalitbang (Predikat)			B	B	BB	BB	A	129,00%	98,57%	92,43%	96,58%	B		
3	Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD			90%	92%	93%	95%	95%	107,77%	99,44%	94,01%	92,58%	95,36%		
4	Konsistensi Renstra OPD terhadap RPJMD			85%	85%	90%	90%	95%	140,00%	110,10%	98,66%	95,19%	96,20%		
5	Persentase Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD			tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	109,87%	100,45%	97,68%	76,44%	97,14%		
6	Persentase SOPD yang capaian program diatas 75%			85%	87%	90%	91%	92%	109,00%	96,70%	98,66%	98,92%	99,66%		
7	Persentase Implementasi hasil kelitbang			81%	82%	84%	85%	86%	113,00%	106,66%	97,13%	91,93%	94,39%		
8	Jumlah Inovasi Daerah			3	8	9	12	15	133,00%	106,66%	0,00%	99,35%	99,09%		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil pengukuran dan analisis kinerja dilakukan sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2023 yaitu ***"Terwujudnya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional"*** Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan tahun 2023 di atas, dapat dijelaskan masing-masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut :

Tabel 3

Sasaran I

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bappedalitbang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN 2023 (%)
1	2		3	4	5
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bappedalitbang	Indeks Reformasi Birokrasi Bappedalitbang	Predikat Realiasi Fisik dan Keuangan (Anggaran)	BB (>90%-100%)	*) 90,96%**	96,56%**

Catatan :

**) Realiasi belum diterima dari hasil evaluasi penilai eksternal (Inspektorat Kabupaten Katingan)*

****) Realiasi berdasarkan perhitungan Realisasi Fisik dan Keuangan (Anggaran)*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Fisik dan Keuangan, menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi Bappedalitbang” adalah sebesar 96,56% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Berhasil**”.

Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 4**Sasaran II****Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET	REALISASI*	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP Bappedalitbang (Predikat)	Predikat	A	*)	
		Realiasi Fisik dan Keuangan (Anggaran)	(>70%-80%)	90,54%**	97,66%**
	2. Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dibagi 100%	92%	85,78%	95,36%
	3. Persentase Konsistensi Renstra SOPD terhadap RPJMD	Capaian target kinerja tahunan (realisasi kinerja sampai dengan tahun N dibagi target Renstra tahun N dikali 100%)	Tinggi	97,19%	99,20%
	4. Persentase Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Jumlah program APBD tahun berkenaan sesuai RKPD dibagi Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%)	85%	94,28%	97,14%
	5. Persentase SOPD yang capaian program diatas 75%	Jumlah SOPD yang capaian programnya diatas 75% dibagi total jumlah OPD dikali 100% (bidang Infrastruktur & kewilayahan)	87%	98,97%***	99,66%***
Rata-rata Capaian					98,11%

Catatan :

*) Realiasi belum diterima dari hasil evaluasi penilai eksternal (Inspektorat Kabupaten katingan)

**) Realiasi berdasarkan perhitungan Realiasi Fisik dan Keuangan

***) Realiasi berdasarkan Aplikasi SIM Pengendalian (Bidang Litbang)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Nilai SAKIP Bappedalitbang (Predikat), Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD, Persentase Konsistensi Renstra SOPD terhadap RPJMD, Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD dan Persentase SOPD yang capaian program diatas 75%" adalah sebesar 98,11% yang berarti masuk dalam kategori capaian "Berhasil".

Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH dengan kegiatan-kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan kegiatan-kegiatan:

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tabel 5
Sasaran III
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Implementasi hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan kelitbangan dikali 100%	86%	83,16%	94,39%
	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah total gagasan inovasi yang ditindaklanjuti sampai tahun N	15	98,81%	99,09%
Rata-rata					97,74%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Persentase Implementasi hasil kelitbangan dan Jumlah Inovasi Daerah” adalah sebesar 97,74% yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Berhasil”**.

Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan kegiatan-kegiatan :

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pada tabel 2,3,dan 4 di atas dapat dianalisis bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran terhadap target indikator kinerja sasaran Renstra Bappedalitbang 2019-2023 sudah mencapai rata-rata pada kategori **“Sangat Berhasil”**

2.3 Isu Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Katingan adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan program dan kegiatan karena dampaknya sangat signifikan di masa yang akan datang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan membawahi 1 (satu) Bagian Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian: Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, dan 4 (Empat) bidang yaitu: Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Bappedalitbang Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappedalitbang Kabupaten Katingan mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- c) Pemantauan dan Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d) Pengkoordinasian, pengendalian pelaporan pembangunan, pengkoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bappedalitbang mempunyai uraian tugas :

- Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinir penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan bidang ekonomi, SDA dan Infrastruktur, bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- Merumuskan kebijakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta dan luar negeri untuk mempercepat pembangunan daerah;

- Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian pelaporan pembangunan, pengkoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Merumuskan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- Melaksanakan pelayanan teknis administrasi badan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian di lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Bappedalitbang, program kegiatan yang dilaksanakan sebagian mengalami perubahan terhadap rancangan awal RKPD yang dibahas dalam KUA dan PPAS Perubahan karena diantaranya mengalami pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan serta penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Bappedalitbang Kabupaten Katingan**

Renja Bappedalitbang Kab. Katingan Tahun 2025

	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3,972,552,872	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96.73	3,552,363,584
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kasongan	Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11 Laporan	23,973,130	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kasongan	Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	95.79	44,358,100
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasongan	Terperuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		295,000,000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasongan	Terperuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.32	263,210,000
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kasongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kasongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-
	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kasongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	34 Orang	295,000,000	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kasongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	99.32	263,210,000
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasongan	Terperuhnya Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi		1,640,260,906	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasongan	Terperuhnya Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi	92.72	1,214,395,419

	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,964,560	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	99.79	30,900,000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasongan	Jumlah bulan penyediaan Peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	216,908,693	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasongan	Jumlah bulan penyediaan Peralatan kebersihan kantor	85.17	184,746,526
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasongan	Jumlah bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	172,080,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasongan	Jumlah bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	90.68	121,533,670
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasongan	- Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan - Jumlah ID Card Pegawai Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, balho dan sejenisnya	- 12 Bulan - 57 Orang - 110 Buah	292,754,153	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasongan	- Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan - Jumlah ID Card Pegawai Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, balho dan sejenisnya	67.67	58,967,850
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kasongan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	27,593,500	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kasongan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.45	13,145,000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasongan	- Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dalam Kabupaten - Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah luar kabupaten	12 Bulan 12 Bulan	899,960,000	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasongan	- Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dalam Kabupaten - Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah luar kabupaten	99.18	805,102,373

	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasongan	Terpenuhi Cakupan unit kerja Internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	353,348,152		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasongan	Terpenuhi Cakupan unit kerja Internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90.38	128,987,900
	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasongan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	353,348,152	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasongan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	90.38	128,987,900
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasongan	Terpenuhi Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		959,816,000	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasongan	Terpenuhi Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	75.29	690,403,560
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasongan	Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan	213,948,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasongan	Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	81.64	164,603,560
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasongan	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	90,140,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasongan	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87.57	77,358,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	655,728,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	71.51	448,442,000
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasongan	Terpenuhi Cakupan unit kerja Internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		900,907,497	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasongan	Terpenuhi Cakupan unit kerja Internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	97.07	742,079,472

	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kasongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,990,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kasongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	98.00	40,171,576
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kasongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	291,760,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kasongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93.78	303,063,896
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	568,157,497	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.63	398,844,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1,990,861,782				85.73	
	Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kasongan	Ditetapkannya dokrenda dengan perda/perkada.		1,264,042,166	Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kasongan	Ditetapkannya dokrenda dengan perda/perkada.	87.47	873,179,566
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penerimaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kasongan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	43,939,346	Sub Kegiatan: Koordinasi Penerimaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kasongan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	45.96	12,260,000
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kasongan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	111,067,075	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kasongan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	95.47	17,064,750
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kasongan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	105,620,803	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kasongan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	99.31	53,168,750

	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	Kasongan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	109,485,721	Sub Kegiatan: Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	95.60	48,736,500
	Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kasongan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	13 Usulan	339,126,377	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kasongan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90.71	243,756,900
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3 Dokumen	554,802,944	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Terverifikasi oleh Kecamatan	85.82	498,192,666
	Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan Dokrenda		235,857,936	Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan Dokrenda	Data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan Dokrenda	92.12	83,700,900
	Sub Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	235,857,936	Sub Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	92.12	83,700,900
	Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Terpenyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokrenda		490,961,680	Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Terpenyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokrenda	Terpenyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokrenda	77.76	225,734,550
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kasongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	5 Laporan	247,879,840	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kasongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	78.04	156,943,550

	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	243,081,840	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	77.14	68,791,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Kasongan			2,116,297,765		Kasongan		97.06	
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kasongan	Terpenuhiya Keselarasan Program dan Kegiatan dalam Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat		520,861,781	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kasongan	Terpenuhiya Keselarasan Program dan Kegiatan dalam Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	94.28	401,068,200
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	15,000,000	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.44	7,705,000

	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan	- Jumlah Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Jumlah Pegawai Yang menerima Honorium - Jumlah Rapat Implementasi PPSP Jumlah Rapat Koordinasi GERMAS - Jumlah Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat - Jumlah Rapat Koordinasi KLA - Jumlah Rapat Koordinasi SPM dan SDG - Jumlah Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	5 Aksi 4 Dokumen 12 Bulan 1 Rapat 2 Rapat 2 Rapat 1 Rapat 2 Rapat 1 Rapat	220,861,781	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan	- Jumlah Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Jumlah Pegawai Yang menerima Honorium - Jumlah Rapat Implementasi PPSP Jumlah Rapat Koordinasi GERMAS - Jumlah Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat - Jumlah Rapat Koordinasi KLA - Jumlah Rapat Koordinasi SPM dan SDG - Jumlah Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	91.20	149,300,200
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kasongan	Hasil Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Kegiatan 0 Laporan 1 Kegiatan	285,000,000	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kasongan	Hasil Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	98.92	244,063,000

	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kasongan	Terpenuhinya Tingkat Keselarasan Renja dan Renstra OPD Bidang Ekonomi		585,000,000	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kasongan	Terpenuhinya Tingkat Keselarasan Renja dan Renstra OPD Bidang Ekonomi	98.97	578,985,000
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100,000,000	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.99	98,985,000
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan		1 Dokumen	485,000,000	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kasongan		98.97	480,000,000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Kasongan			1,241,822,400		Kasongan		84.63	
	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kasongan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana	85%	476,172,770	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kasongan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana	96.96	372,265,666
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kasongan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	476,172,770	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kasongan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	96.96	372,265,666
	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kasongan	Persentase penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	85%	433,554,222	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kasongan	Persentase penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	69.36	287,950,100

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, sebagai berikut:

Tema Pembangunan : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Prioritas Nasional :

Prioritas 1 : Sumber daya manusia berdaya saing dan produktif;

Prioritas 2 : Infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas;

Prioritas 3 : Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2025, Renja Bappedalitbang Kabupaten Katingan Tahun 2025 tidak mendukung secara langsung Prioritas-Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah serta mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur

beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, responsible, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;

4. mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan telah menyusun RKPD Tahun 2024 sesuai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (mapping) pada level urusan, bidang urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah. Dari hasil mapping, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan terdiri atas dua urusan, yaitu urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun. Untuk itu yang menjadi tujuan dari Renja adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Profesionalisme aparatur Bappedalitbang dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan.
- b. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

- d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penganggaran, serta Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat .
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk melaksanakan pengembangan pembangunan daerah yang terpadu dan sinergis guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan, Mengembangkan dan memanfaatkan Peran Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan Pengambilan kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan memantapkan Sistem Koordinasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Efektifitas Koordinasi dalam penyusunan Dokumen Rencana.
- b. Terwujudnya Pengembangan Sistem dan kualitas Data dan Informasi.
- c. Tersedianya Produk Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sesuai Kebutuhan.
- d. Terlaksananya sistem koordinasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan
- e. Tersedianya Aparatur perencana yang terampil dalam bidang Sosial, Budaya, Ekonomi, Keruangan dan pemanfaatan Teknologi.
- f. Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang IPTEK yang berkualitas dan mampu memberikan Kontribusi dalam Pembangunan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Katingan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Selanjutnya, seluruh program dan kegiatan diupayakan untuk mengakomodir amanat sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dengan fokus pada aspek perencanaan maupun aspek pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan aspek-aspek pendukung lainnya, seperti penyiapan, pengolahan serta penyajian data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

Adapun Rencana kerja Bappedalitbang tahun 2025 mencakup 4 program terdiri 15 kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan-kegiatan :**
- Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - Inovasi dan Inovasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk membiayai semua program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2025 sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan, dengan besaran kebutuhan dana indikatif sebesar Rp. **15.051.958.194,-** yang terdiri dari :

Perencanaan sebesar	Rp. 13.882.868.942,-
Penelitian dan Pengembangan sebesar	Rp. 1.169.089.252,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Bappedalitbang Kabupaten Katingan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
(tabel terlampir)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak dan seluruh jajaran melalui proses saling berkomunikasi dengan baik yakni *top down* dan *bottom up approach*. Dengan penentuan Rencana Strategis dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, selain digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Katingan ini diharapkan akan menjadi tolok ukur program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

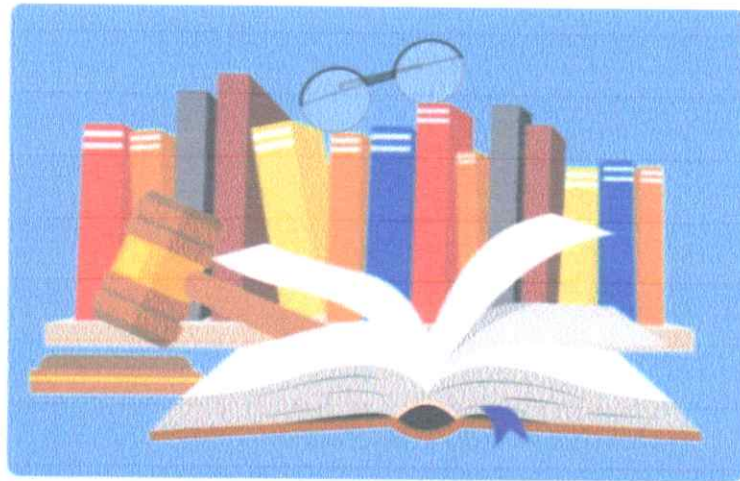
Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun 2025 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan Kabupaten Katingan.

Kasongan, Juli 2024

y Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Katingan

JONIAN TO, SP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19660601 199803 1 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN



[illegible]

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. KATINGAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROJEKSI MALU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NABIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN						15.051.988.194,00							14.834.048.709,00	
5.01		PERENCANAAN						15.051.988.194,00							14.834.048.709,00	
5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat			A Predikat	13.882.868.942,00							12.121.104.600,00	
5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	230.632.889,00			*	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesionalitas dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.	Badan/ditbang	100 Persen	204.362.103,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRICA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Pangkat Daerah	Terpenuhiya Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	95 Persen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							95 Persen	435.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Bappedalitbang	95 Persen	331.998.811,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang			43 Orang	435.000.000,00	Kab. Kelingan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Bappedalitbang	43 Orang	331.998.811,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	6	7	47 Orang/bulan	5.031.727.935,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12	13	15	16	17
														47 Orang/bulan	4.071.866.694,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.02.0007																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD	13 Laporan			13 Laporan	59.998.708,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			13 Laporan	26.979.816,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengiriman yang Disediakan	5 12 Paket	6	7	8 12 Paket	9 152.222.400,00	10 Kab. Kalingan, Semut Kecamatan, Semut KelDesa	11 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 -	13 Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6. Pencapaian pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6.	14 -	15 12 Paket	16 329.471.092,00	17 BADAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan	12 Dokumen			12 Dokumen	27.593.500,00	Kab. Kalingan, Semut Kecamatan, Semut KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6. Pencapaian pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6.	-	12 Dokumen	27.593.500,00	BADAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	BUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	90.798.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Percepatan penerapan Reformasi Brokrasi menuju pe mentahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Bappedalitbang Kab. Klaten	12 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			5 Laporan	474.648.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Brokrasi menuju pe mentahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Bappedalitbang Kab. Klaten	12 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan serana dan prasana aparat	100 Persen			100 Persen	1.399.630.080,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Brokrasi menuju pe mentahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	-	100 Persen	863.898.432,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALISIS PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN REJENJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Serta Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen			1 Dokumen	110.889.294,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah	Penda Kab. Kalingan	1 Dokumen	285.439.007,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen	1 Dokumen (RKPD/RPJM D)			5 Dokumen (RKPD/RPJM D)	204.544.290,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pengoptimalan pembangunan di daerah	Penda Kab. Kalingan	1 Dokumen (RKPD/RPJM D)	278.968.887,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota																
5.01.02.2.03.0001																

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang telah direvisi/penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							1 Dokumen Dokumen	402.922.243,00	Kab. Kutatingan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6.	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	383.896.657,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan			1 Dokumen Laporan	0,00	Kab. Kutatingan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6.	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	225.083.804,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN PENCAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kawilayahan	Terpenuhinya Tingkat Akselerasi Rempu dan Resilensi OPD Bidang Ekonomi	100 Persen	6	7	100 Persen	490.125.981,00	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP, PD, RP-IMD dan RKPD)		1 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Kalangan, Semua Kecamatan, Semua KMD	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kawilayahan	1 Dokumen	112.541.902,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kawilayahan (RP, RP-IPD, RP-IMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-IPD RP-IMD dan RKPD)	1 Dokumen								Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewifayahen yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	460.125.881,00	Kab. Kutatingan, Semua kecamatan, Semua Noll Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, profl dan akuntabel dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6.	1 Dokumen	545.828.225.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.169.089.232,00							2.712.844.100,00	
1.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil Riset dan Inovasi daerah yang ditindaklanjuti/diterapkan	-			85 %	1.169.089.252,00						-	2.712.844.100,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan pertanggung jawaban dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengajaran, dan penerapan				2 Laporan	464.242.900,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis jalur pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang beriman, berprestasi, berdaya saing, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing 2. Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas dan adaptif dan tangguh	-	657.944.100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan portajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	115.437.172,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAT OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyeleenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1 Laporan	328.870.788,00	Kab. Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan kegiatan produksi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBAANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah																
5.05.03.2.02.0004																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakerja yang telah selesai dari lokasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						2 Laporan	147.572.710,00	Kab. Kalangan, Samudra Selatan, Kecamatan Samudra Kali/Desa	DANA TRANSFER UMIL-DANA ALOKASI UMUM	-		Mendudika dari tiga sumbu daya dalam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkeseimbangan dan Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri, kegiatan parawisata; yang mendukung keberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menuju ke mandirian		415.000.000,00	BIDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.03.2.02.0012																
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																

